

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penurunan kawasan mangrove di Kabupaten Demak selama periode 2003 hingga 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa luas kawasan mangrove berkurang dari 2.665,71 Ha pada tahun 2003 menjadi 1.993,05 Ha pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh konversi lahan untuk tambak, pemukiman, dan kegiatan ekonomi lainnya, yang tidak sejalan dengan arahan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak. Kesenjangan ini berpotensi mengganggu pola ruang yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada hilangnya fungsi ekologis mangrove yang vital.

Model prediksi menggunakan metode Cellular Automata, dapat diprediksi bahwa jika tren penurunan ini terus berlanjut, luas kawasan mangrove dapat menyusut lebih jauh hingga 1.701,86 Ha pada tahun 2031. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang signifikan, kawasan mangrove akan terus terdegradasi, yang akan berdampak negatif pada lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif agar kesenjangan antara perencanaan dan realitas dapat diminimalkan.

Evaluasi terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Demak menunjukkan ketidaksesuaian signifikan antara alokasi kawasan dalam rencana dan kondisi aktual. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan dinamika perubahan kawasan mangrove mengakibatkan meningkatnya kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana alam, serta hilangnya zona penyangga yang direncanakan dalam dokumen RTRW. Pengkajian terhadap perubahan garis pantai juga mengindikasikan bahwa beberapa kecamatan, seperti Sayung dan Karangtengah, mengalami perubahan yang signifikan, yang tidak diantisipasi dalam perencanaan. Hal ini menunjukkan perlunya revisi RTRW dan pendekatan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan.

Arahan penataan ruang yang lebih berkelanjutan diperlukan dengan memperhatikan strategi yang mencakup pengembangan sabuk hijau di sepanjang pesisir, penerapan sistem agroforestri untuk melindungi kawasan hortikultura, serta penggunaan

konsep permukiman yang tahan terhadap perubahan iklim. Selain itu, pembangunan pelindung pantai seperti breakwater dan seawall serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah industri harus menjadi prioritas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keberlanjutan ekosistem mangrove di Kabupaten Demak dapat terjaga, sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap ancaman lingkungan.

5.2 Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk pemerintah dan penelitian selanjutnya :

1. Perlu mengkaji dampak degradasi mangrove terhadap ekosistem pesisir, seperti perubahan biodiversitas, kualitas air, dan dampak terhadap masyarakat lokal yang bergantung pada ekosistem mangrove.
2. Pemerintah perlu merevisi RTRW dengan memperluas alokasi kawasan lindung untuk ekosistem mangrove. Luasan mangrove yang direncanakan saat ini (701,264 Ha) jauh di bawah kebutuhan aktual untuk menjaga kestabilan ekosistem pesisir. Perlu ada peningkatan alokasi lahan untuk konservasi mangrove.
3. Pemerintah perlu mengembangkan sabuk hijau (*green belt*) di sepanjang pesisir, terutama di daerah yang rentan terhadap abrasi seperti Kecamatan Sayung, Karangtengah, dan Bonang. Sabuk hijau ini akan berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan intrusi air laut.
4. Pemerintah perlu menetapkan zonasi yang lebih detail untuk kawasan pesisir, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan garis pantai dan ekosistem mangrove. Zonasi ini harus mencakup area yang dilindungi, area budidaya, dan area industri.